

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Emzir. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Harrison Lisa. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hall, A. T. (2005). *Accountability in organizations: An examination of antecedents and consequences*.
- Iriawan. Maksud. B. (2019). *Dasar-dasar Administrasi Publik dari klasik ke kontemporer*, Pt Rajagrafindo Persada.
- J. Creswell, John. (2015). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Edisi Indonesia Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Raba, Manggaukang. (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Suyanto, Bagong. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Sukardi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mifta. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer Prenada Media Grup divisi Kencana*.

KARYA TULIS

- Herman, Joffri, (2015). *Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik E-Procurement* di Kabupaten Toraja Utara, Universitas Hasanuddin.
- Mukhilda, N. (2008). *Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation).

JURNAL

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2016). The relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. *Journal of Indonesian economy and business*.
- Dewi, Y. K., & Parwiyanto, H. (2018). Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*.
- Fransisco, D., & Mahida, M. (2015). Dampak Kebijakan dalam Pembangunan Waduk Jatigede. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*.
- Handoko, W., Sulaiman, A. I., & Akbar, A. A. S. (2014). Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembagunan Bendungan Matenggeng Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Komunikasi*.
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder". *Public administration review*.
- Lan & Bpkp. (2000) Akuntabilitas Dan Good Governance". (Jakarta: Lan).
- Mulyani, Tri. Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang. Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pramono, Z. T., & Subowo, A. (2015). Akuntabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Rakhmat. (2007). Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bercirikan Akuntabilitas Publik. Studi Ilmu Administrasi.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Swela, A., Santosa, E., & Manar, D. (2017). Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*.

Suntoro, A. (2019). Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.

Wiryawan, B. A., & Setianto, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Bendungan: Studi Kasus Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas Dan Bendungan Pidekso. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*.

DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahan Informasi Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar. Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 25 Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Aturan Pelaksananya

Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Ganti Rugi dengan Pemukiman Kembali

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

WEBSITE

Provinsi Sulawesi Selatan. (2017). Bendungan Pammukulu Mulai Dikerjakan. Diakses tanggal 19 Oktober 2020 dari <https://sulselprov.go.id/welcome/post/bendungan-pammukulu-mulai-dikerjakan>

Rio Anthony. (2020). *Pembangunan Bendungan Pamukkulu Takalar Dilanjutkan*. Diakses tanggal 28 Oktober 2020 dari <https://www.tagar.id/pembangunan-bendungan-pamukkulu-takalar-dilanjutkan/amp/>

Kabupaten Takalar. *Sejarah Kabupaten Takalar*. Di akses Tanggal 02 Desember 2020 dari

[http://www.takalarkab.go.id/selayang_pandang/sejarah/kabupaten takalar](http://www.takalarkab.go.id/selayang_pandang/sejarah/kabupaten_takalar)

Wikipedia. *Kabupaten Takalar*. Di akses tanggal 13 Desember 2020 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Takalar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar)

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan



Pejabat Pembuat Komitmen BBWS-PJ



Kepala Seksi Bagian Pengadaan Tanah. Kantor BPN Takalar



Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Kantor BPN Takalar



Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor BPN Takalar



Kepala Desa Kale Ko'mara



Masyarakat Terdampak Pembebasan Tanah



Lokasi Pembangunan Bendungan Pammukkulu



Masyarakat Terdampak pembebasan Tanah



Salah satu rumah warga yang telah di bebaskan